NEGARA INDONESIA TIMUR: Dari Negara Federasi Hingga Integrasi dalam Republik Indonesia (1946-1950)

Anwar Firdaus Mutawally¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia

Anwarfirdausmutawally@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dan sejarah berlangsungnya pemerintahan Negara Indonesia Timur dari tahun 1946-1950. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sejarah dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Negara Indonesia Timur (NIT) terbentuk melalui dua perundingan yakni Perundingan Malino dan Konferensi Denpasar pada tahun 1946. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Timur dipegang oleh presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen, sedangkan pemerintahan daerah dipimpin oleh raja. Awal masa pemerintahan NIT dilalui dengan instabilitas, kekacauan politik, dan hubungan yang renggang dengan RI. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan perdana menteri Anak Agung keadaan berubah dan NIT dapat memperbaiki hubungan dengan RI serta membantu RI mendapatkan kedaulatannya. Pada tahun 1949, NIT bergabung menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah menjadi bagian negara RIS, terjadi pergerakan massa di NIT dan para demonstran meminta NIT dibubarkan dan digabungkan kembali kedalam RI. Terjadi perlawanan yang dilakukan Chris Soumokil dan Andi Azis untuk menghentikan proses integrasi NIT kedalam RI dengan melakukan pemberontakan. Meskipun demikian, usaha mereka gagal dan pada bulan April 1950, NIT memulai persiapan untuk bergabung kembali kedalam RI. Akhirnya Negara Indonesia Timur secara resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh presiden Soekarno dengan pembubaran RIS.

Kata Kunci: Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia, Republik Indonesia Serikat, Integrasi, Negara Federal.

Abstract

This article aims to explain how the government system and the history of the administration of the State of East Indonesia from 1946-1950. The method used in this study is a historical method with data collection techniques using library research. The State of East Indonesia (NIT) was formed through two negotiations, namely the Malino Negotiation and the Denpasar Conference in 1946. The system of government of the State of East Indonesia is held by the president, prime minister, and chairman of the parliament, while regional government is led by the king. The beginning of the NIT administration was passed with instability, political turmoil, and tenuous relations with the Republic of Indonesia. However, during the reign of the prime minister Anak Agung things changed and NIT was able to improve relations with RI and help RI to gain its sovereignty. In 1949, NIT merged into the state of the Republic of the United States of Indonesia (RIS). After becoming part of the RIS state, there was a mass movement in NIT and demonstrators asked for NIT to be disbanded and reintegrated into RI. There was resistance by Chris Soumokil and Andi Azis to stop the process of integrating NIT into RI by carrying out a rebellion. However, their efforts failed and in April 1950, NIT began preparations to rejoin RI. Finally, the State of East Indonesia was officially dissolved on 17 August 1950 when President Soekarno dissolved the RIS.

Keywords: State of East Indonesia, Republic of Indonesia, Republic of Indonesia States, Integration, Federal State.

Pendahuluan

Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan ini mempercepat kemerdekaan Indonesia, hasilnya Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya berdiri setelah diproklamirkan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun pemerintahan kolonial Belanda yang melakukan pengungsian di Australia enggan mengakui didirikannya negara baru tersebut dan berusaha mengembalikan kekuasaannya di Indonesia (Najamuddin dan Bustan, 2017, hlm. 390).

Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, pola revolusi di wilayah timur berbeda dibandingkan yang terjadi di pulau Jawa dan Sumatra. Perlawanan secara fisik jarang terjadi di wilayah timur dan hanya terkonsentrasi di beberapa tempat seperti Sulawesi Selatan dan Bali. Memanfaatkan celah tersebut, Letnan Gubernur Jenderal H. J. Van Mook kemudian berusaha mendirikan negara federal “boneka” pemerintah Belanda di Borneo dan Timur Besar (Groote Oost). Wilayah Timur Besar terdiri atas Sulawesi, Bali, Papua Barat, kepulauan Maluku, kepulauan dan Sunda Kecil. Ia menawarkan ide negara federasi kepada rakyat Indonesia di Timur Besar dan mendapat dukungan disana (Najamuddin dan Bustan, 2017, hlm. 390).

Keberhasilan van Mook dalam mengajak rakyat Indonesia timur mendirikan pemerintahan federal kemudian menjadi dasar terlaksananya Konferensi Malino pada 15-24 Juli 1946 yang bertujuan untuk mendirikan Negara Indonesia Timur. Secara resmi Negara Indonesia Timur didirikan pada tanggal 24 Desember 1946 dengan diselenggarakannya Konferensi Denpasar (Agung, 1992, hlm. 38).

Negara Indonesia Timur merupakan contoh kompleks hubungan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Belanda, dan rakyat Indonesia Timur. Meskipun tujuan didirikannya Negara Indonesia Timur ialah untuk kepentingan Belanda di Indonesia, pada kenyataannya Negara Indonesia Timur justru banyak membantu Republik Indonesia untuk mendapatkan kedaulatannya. Selain itu, sejak disahkannya Perjanjian Linggarjati pada Maret 1947. Permasalahan menimpa para pejuang Indonesia timur, sebab perlawanan fisik rakyat Indonesia timur mustahil dilakukan karena secara hukum Indonesia timur telah diserahkan kepada Belanda. Oleh sebab itu maka para pejuang Indonesia berjuang dengan memasuki parlemen Negara Indonesia Timur hingga pembubarannya (Djunedding, 2019, hlm. 570).

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana berlangsungnya pemerintahan Negara Indonesia Timur pada tahun 1946-1950. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini ialah “Bagaimana berlangsungnya pemerintahan Negara Indonesia Timur (1946-1950)?”. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa rumusan masalah yakni 1) Bagaimana proses terbentuknya Negara Indonesia Timur?; 2) Bagaimana sistem pemerintahan Negara Indonesia Timur?; 3) Bagaimana keadaan politik Negara Indonesia Timur?; 4) Bagaimana proses pembubaran Negara Indonesia Timur?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau metode historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau termasuk didalamnya metode dalam menggali, memberi penilaian, mengartikan serta menafsirkan fakta-fakta masa lampau untuk kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan dari peristiwa tersebut (Gottschalk, 1986:32). Menurut Gray dalam Sjamsuddin (2012, hlm. 89), ada enam tahap yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian sejarah yakni: 1) memilih topik yang sesuai, 2) mencari semua bukti (evidensi) yang sesuai dengan topik yang akan dikaji, 3) membuat cararan apa saja yang dianggap penting dan sesuai dengan topik ketika penelitian sedang berlangsung, 4) mengevaluasi secara kritis bukti yang telah dikumpulkan (kritik sumber), 5) menyusun hasil penelitian dalam suatu pola dan sistematika tertentu yang benar, dan 6) menyajikan hasil dengan cara yang menarik perhatian dan mengkomunikasikan kepada pembaca dengan jelas dan dapat dimengerti.

Adapun teknik pengumpulan digunakan penulis pada penelitian ini ialah *library research* atau studi kepustakaan. Menurut Simanjuntak dan Sosrodiharjo (2014, hlm. 8), *library research* atau studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang menuntut peneliti untuk banyak “berdialog” dengan buku, arsip, dokumen, jurnal, catatan, dokumentasi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan. Penelitian studi kepustakaan diambil dari data-data lapangan yang telah ada dalam penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan.

Pembahasan

Proses Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT)

Sejak kedatangan pasukan sekutu di Indonesia pada tahun 1945, Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia Timur sangat minimal dan hasilnya pasukan sekutu yakni Australia dapat menduduki Indonesia Timur dengan mudah (Male, 1965, hlm. 41-42). Letnan Jenderal H. J van Mook selaku wakil pemerintah Belanda bersama elemen NICA (Netherlands Indies Civil Administration) tiba di pulau Jawa pada tanggal 1 Oktober 1945 (Bayly dan Harper, 2008, hlm. 171). Ia kemudian merancang strategi federale politiek atau politik federal. Isi strategi ini berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara bagian Belanda. Van Mook kemudian menawarkan idenya tersebut pada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 10 Februari 1946, namun sebagian besar rakyat Indonesia dari Sumatra, Jawa, dan Madura menolak masuknya Indonesia sebagai negara bagian Belanda (Najamuddin dan Bustan, 2017, hlm. 390).

Oleh sebab kegagalan tersebut, maka van Mook merencanakan strategi yang lain yakni mendirikan daerah-daerah otonom atau negara-negara boneka buatan Belanda

di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan Belanda, sebab dengan mendirikan daerah otonom maka pemerintah Belanda dapat mengembalikan alat kekuasaannya seperti KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger) dan BB (Binnenlands Bestuur) di Indonesia melalui perantara negara-negara boneka tersebut (Susanti, 2013, hlm. 593).

Pada bulan Maret 1946, Australia mulai meninggalkan Indonesia timur dan menyerahkan wilayah tersebut kepada NICA (Male, 1965, hlm. 60). Kedatangan NICA menimbulkan kemarahan bagi sebagian rakyat di Indonesia timur. Alasan tersebut menjadi penyebab salah satu perlawanan yang cukup signifikan yakni Pertempuran Puputan Margarana di Bali pada 20 November 1946. Setelah seluruh pasukan Ciung Wanara gugur pada pertempuran tersebut, NICA semakin leluasa dalam mengendalikan wilayah Indonesia (Wirawan, 2008, hlm. 55).

Disela gangguan-gangguan tersebut, Van Mook berusaha untuk mempromosikan strategi politiknya kepada rakyat Indonesia Timur. Ia menjanjikan bahwa negara federal dapat menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia Timur. Hasilnya banyak rakyat Indonesia Timur yang tertarik dengan ide Van Mook tersebut (Amir, 2010, hlm. 343). Selain itu, terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan rakyat Indonesia Timur memilih bekerjasama dengan Van Mook untuk mendirikan Negara Federal dan tidak melakukan perlawanan fisik yang besar seperti di Jawa dan Sumatra.

1. Perjuangan fisik melawan Belanda hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia Timur

Beberapa tokoh pejuang Indonesia seperti Nadjamuddin Daeng Malewa dan Dr. Ratulangi melihat perekonomian Indonesia sangat menderita setelah berakhirnya penjajahan Jepang. Menurut mereka, perlawanan fisik dengan Belanda hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia lebih lanjut. Oleh sebab itu, mereka merasa tawaran Van Mook untuk mendirikan negara federasi dapat menghindari kerusakan yang lebih besar di Indonesia Timur (Harvey, 1990, hlm. 226).

2. Raja-raja di Indonesia Timur menginginkan otonomi yang lebih baik

Raja-raja di Sulawesi Selatan menyambut sistem negara federal dengan harapan dengan adanya sistem pemerintahan tersebut, maka mereka dapat diberikan otonomi yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kerajaannya. Mereka khawatir dengan adanya sistem pemerintahan republik yang sentralistik maka hak-hak mereka untuk mengatur kerajaan akan hilang (Harvey, 1990, hlm. 228).

3. Kekhawatiran akan dominasi orang Jawa di perpolitikan Indonesia Timur

Menurut Harvey (1990, hlm. 223), Meskipun rakyat Indonesia Timur setuju dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada kenyataannya sebagian dari mereka menaruh curiga akan dominasi orang Jawa dalam perpolitikan Indonesia.

Pembentukan negara federal ini diharapkan dapat membendung pengaruh orang Jawa di Indonesia Timur.

Melihat respon masyarakat Indonesia Timur yang cukup antusias dengan pembentukan negara federal di Indonesia Timur. Van Mook kemudian mengadakan perundingan di Malino pada bulan Juli 1946. Dalam perundingan ini ia mengundang wakil-wakil dari Indonesia Timur untuk merencanakan pembentukan negara federal. Perundingan ini menimbulkan reaksi yang beragam, ada yang setuju dengan pembentukan negara federal, ada pula yang tetap bertahan dengan negara kesatuan (unitaris). Kelompok federal melihat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam dan keberagaman tersebut harus ditunjang dengan negara federasi dengan budaya masing-masing. Lain halnya dengan kelompok negara kesatuan yang melihat Indonesia memiliki perasaan historis yang sama yakni bekas jajahan Belanda (Amir, 2010, hlm. 344).

Untuk mempercepat hasil persidangan sesuai keinginannya, Van Mook kemudian mempengaruhi para peserta perundingan dengan mengutarakan kelemahan negara kesatuan. Ia mengungkapkan kepada para peserta bahwa negara kesatuan hanya akan menciptakan perpecahan, sebab negara kesatuan hanya akan menampung keinginan dari kelompok mayoritas saja. Ia kemudian menyarankan para peserta untuk menerima sistem federasi. Oleh sebab itu maka perundingan Malino dimenangkan oleh kelompok federal (Amir, 2010, hlm. 344-345).

Gambar 1. Wilayah NIT dalam sampul Majalah Pandji Negara (Sumber: Makello, 2017, hlm. 317)

Rencana pembentukan negara federal semakin didukung dengan berlangsungnya Perundingan Linggarjati antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 November 1946. Hasil keputusan kemudian diparaf oleh para peserta pada tanggal 15 November 1946 dan memperkuat alasan Belanda untuk mendirikan negara federal Indonesia yang terdiri atas Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar (Amir, 2010, hlm. 345).

Pada bulan Desember 1946, van Mook kemudian mengumpulkan kembali para perwakilan Indonesia Timur dalam Konferensi Denpasar untuk menentukan nama negara federal Indonesia Timur, lokasi ibukota dan wilayah negara, dan pemimpin negara tersebut. Hasil persidangan pada tanggal 24 Desember kemudian menghasilkan 3 keputusan yakni berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), NIT

beribukota di Makassar dan memiliki teritori yang mencakup bekas wilayah Timur Besar (*Grote Oost*) (Amir, 2010, hlm. 345).

Untuk pencalonan presiden NIT, terdapat dua kandidat yakni Tjokorda Gde Rake Soekawati dan Tadjoeuddin Noor. Setelah melalui hasil voting, Tjokorda Gde Rake Soekawati memenangkan pemilihan presiden Negara Indonesia Timur pada saat tersebut dan dipilih menjadi presiden NIT. Adapun Tadjuddin Noor kemudian dipilih menjadi ketua parlemen NIT. Selain mengangkat presiden dan ketua parlemen NIT, para peserta sidang juga memilih Nadjamuddin Daeng Malewa sebagai perdana menteri NIT (Djunedding, 2019, hlm. 570).

Pada 13 Januari 1947, presiden Soekawati dan Perdana menteri Nadjamuddin pergi ke Jakarta untuk mendiskusikan bentuk kabinet pertama NIT bersama pemerintah Belanda. Hasil persidangan kemudian menghasilkan keputusan untuk mengangkat 9 orang menteri dalam Kabinet Nadjamuddin (Amir, 2010, hlm. 345). Meskipun demikian, menurut Kadir (1984, hlm. 217), pengangkatan kabinet Nadjamuddin tidak disertai dengan pembentukan aparat penegak pemerintah, inilah yang kemudian menjadi celah bagi militer Belanda untuk mengisi pertahanan NIT sehingga NIT tak ayal hanya sebuah negara boneka bentukan Belanda.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT)

Pada awal pendiriannya, Parlemen NIT terdiri dari dua fraksi yakni Fraksi Pembangunan dan Fraksi Progresif. Fraksi Pembangunan diisi oleh anggota parlemen pendukung Tjokorda Gde Rake Soekawati sebagai presiden NIT, sedangkan Fraksi Progresif diisi oleh pendukung Mr. Tadjuddin Noor sebagai presiden NIT. Sejak kemenangan Tjokorda Gde Rake Soekawati menjadi Presiden NIT pada 24 Desember 1946, Fraksi Progresif memilih menjadi oposisi terhadap pemerintah hingga dibubarkannya NIT pada tahun 1950. Persaingan antara kedua fraksi ini lalu melahirkan fraksi ketiga bernama Fraksi Nasional yang menjadi penengah diantara keduanya (Djunedding, 2019, hlm. 570).

Menjelang terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), susunan parlemen NIT berubah menjadi 4 fraksi dan 1 kelompok non-fraksi. Mayoritas fraksi parlemen diisi dengan Fraksi Progresif sejumlah 33 orang anggota, fraksi Nasional sejumlah 22 orang, Fraksi Demokrat sejumlah 5 orang, dan Fraksi IEV sejumlah 3 orang. Adapun untuk anggota non-fraksi sejumlah 5 orang. Pada masa ini Fraksi Progresif dipimpin oleh Arnold Mononutu, Fraksi Nasional dipimpin oleh Andi Massarapi, Fraksi Demokrat dipimpin oleh F.A.P Pitoei, dan non-fraksi dipimpin oleh O. Basalamah. Dari keempat fraksi parlemen NIT yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya fraksi Progresif dan Nasional (tidak terang-terangan) yang membantu memperjuangkan Republik Indonesia secara diplomasi (Djunedding, 2019, hlm. 571).

Terdapat tiga pemikiran yang berkembang dalam parlemen NIT. Pertama ialah aliran B.B (*Binnenlands Bestuur*), aliran ini diikuti oleh Presiden Soekawati. Aliran kedua ialah *Provincialis*, aliran ini diikuti oleh Nadjamuddin Daeng Malewa.

Sedangkan aliran terakhir ialah *Republikeins* atau pro-Republik, aliran ini diikuti oleh Tadjuddin Noor (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 132). Kedua aliran sebelumnya bersifat kooperatif dengan pemerintah Belanda sedangkan *Republikeins* bersifat non-kooperatif dengan pemerintah Belanda.

Dari ketiga aliran pemikiran ini menurut Departemen Penerangan Indonesia (1953, hlm. 132), mayoritas rakyat NIT menganut aliran pro-Republik dan masih setia terhadap Republik Indonesia. Aliran pro-Republik yang kemudian menjadi kunci dalam integrasi NIT kedalam Republik Indonesia pada tahun 1950.

Mayoritas pemerintahan daerah di NIT dipimpin oleh raja. Para raja diberikan status otonomi oleh pemerintah Belanda dan diatur dalam undang-undang yang dikenal sebagai *korte verklaring* (deklarasi jangka pendek) dan *lange kontrakten* (kontrak jangka panjang). Suksesi kepemimpinan swapraja dilakukan dengan cara turun temurun. Adapun untuk pola sistem pemerintahan di NIT akan dijelaskan di bawah ini (Agung, 1996, hlm. 121).

Menurut Gie (1967, hlm. 142-143) terdapat dua pola sistem pemerintahan di NIT yakni prinsip Bali (*Bestuurscollege*), dan prinsip Lombok (*Neo-landschap*). Prinsip Bali (*Bestuurscollege*) ialah sistem pemerintahan dimana daerah swapraja NIT diperintah oleh Dewan Raja-raja dan Dewan Perwakilan. Pembuatan peraturan daerah dan anggaran keuangan ditangani oleh kedua dewan ini. Pola ini digunakan oleh sebagian besar wilayah NIT yakni Bali, Sumbawa, Flores, Timor, Sumba, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sangihe-Talaud, dan Maluku Utara.

Adapun untuk prinsip Lombok (*Neo-landschap*) ialah sistem pemerintahan dimana daerah swapraja NIT diperintah oleh Badan Pemerintahan Harian dan Dewan Lombok yang diketuai oleh Kepala Daerah. Pola ini digunakan pada tiga wilayah yakni Maluku Selatan, Minahasa dan Lombok (Gie, 1967, hlm. 144-143).

Berlangsungnya Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT)

Permasalahan pertama yang dihadapi Negara Indonesia Timur adalah pemberontakan yang dilancarkan para pejuang Republik Indonesia di Sulawesi Selatan pada akhir 1946. Para pejuang Indonesia merasa kecewa dengan sikap Najuddin Daeng Malewa yang memilih berkooperasi dengan pemerintah Belanda. Oleh sebab itu rakyat Sulawesi Selatan melakukan upaya agar NICA tidak membuat kekacauan di Sulawesi Selatan (Ridwan, Melay, dan Bunari, 2017, hlm. 6).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Belanda lalu mengerahkan tentara KNIL dan sekutu dari tokoh adat serta raja-raja setempat untuk memadamkan pemberontakan disana. Meskipun demikian, pemberontakan tak mampu dipadamkan dan semakin menyebar di seluruh Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, Letnan Jenderal Van Mook dan Simon Hendrik Spoor lalu mengerahkan pasukan khusus Belanda yakni *Depot Speciale Troepen* (DST) di bawah pimpinan Raymond

Westerling untuk memadamkan pemberontakan di Sulawesi Selatan (Ridwan, Melay, dan Bunari, 2017, hlm. 6-7).

Pada bulan Desember 1946 hingga Februari 1947, Raymond Westerling dan pasukan DST melakukan pembantaian terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Hal ini ditujukan untuk meredam pemberontakan dan melumpuhkan perjuangan rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan (Ridwan, Melay, dan Bunari, 2017, hlm. 6). Kurang lebih terdapat 3.000 jiwa pejuang dan rakyat sipil Sulawesi Selatan yang menjadi target pembunuhan sistematis (Ricklefs, 2005, hlm. 451).

Sepanjang bulan Januari hingga Februari 1947 terjadi kontak senjata antara Laskar Pejuang dengan pasukan KNIL seperti pertempuran Langese Komara dan pertempuran Kassi-Kassi. Pada masa ini banyak pejuang yang berguguran seperti Emmy Saelan dan Ranggong Daeng Romo. Selain itu salah satu pejuang Indonesia, Robert Wolter Monginsidi, berhasil ditangkap pasukan Belanda dan dijebloskan ke penjara Hoogepad di Makassar (Djunedding, 2019, hlm. 571).

Setelah pembunuhan sistematis selesai dilakukan, Westerling kemudian dipecat sebagai komandan DST dan dipindahkan pemerintah Belanda ke Jawa Barat untuk mendirikan pasukan baru bernama APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Pembentukan APRA bertujuan untuk menyembunyikan kesalahan Westerling dan menghindari dirinya diadili sebagai penjahat perang, sebab dengan adanya peristiwa genosida tersebut akan memberikan kesan buruk bagi hubungan Indonesia dan Belanda (Ridwan, Melay, dan Bunari, 2017, hlm. 7).

Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati pada bulan Maret 1947 yang mengakui Jawa, Sumatra, dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini secara tidak langsung menghancurkan harapan para pejuang Republik Indonesia di Indonesia Timur untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Sebab wilayah Indonesia Timur secara hukum telah diserahkan kepada Belanda dalam perjanjian tersebut (Djunedding, 2019, hlm. 570).

Gambar 2. Presiden Soekawati memberikan pidato pada sidang parlemen NIT 22 April 1947 (Sumber: Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 129)

Pada tanggal 22 April 1947, NIT mengadakan sidang pertamanya selama 40 hari untuk membahas mengenai kebijakan *politik manifest* yang membahas kerjasama lanjutan dengan Belanda. Pihak oposisi dari Fraksi Progresif sangat menentang keras kebijakan tersebut dan secara terang-terangan menunjukkan sikap pro-Republik. Salah satu dari anggota fraksi Progresif pada saat tersebut yakni Nani Wartabone mengucapkan “sekali ke Djogja tetap ke Djogja, sekali merdeka tetap merdeka” yang menciptakan kegaduhan saat berjalannya sidang (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 132).

Persidangan lalu semakin memanas, Sonda Daeng Mattayang sebagai pemimpin fraksi pembangunan kemudian mengajukan mosi tidak percaya terhadap Mr. Tadjuddin Noor karena Noor selaku pimpinan parlemen tidak mampu meredam suasana persidangan yang kacau tersebut. Pada tanggal 27 Mei 1947, Tadjuddin M. Noor dan 32 pengikutnya dari Fraksi Progresif keluar dari persidangan (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 132).

Selain itu, perdana menteri Nadjamudin Daeng Malewa menimbulkan kontroversi dalam parlemen NIT, sebab ia menyatakan dukungannya terhadap Agresi Militer Belanda I pada tanggal 22 Juli 1947. Nadjamuddin kemudian menjadi delegasi ke dewan keamanan PBB pada Agustus 1947 sebagai perwakilan NIT yang mendukung Agresi Militer Belanda I. Namun setibanya disana ia ditolak oleh perwakilan PBB dan dipermalukan Amerika Serikat saat persidangan sedang berlangsung. Merasa kecewa ia kemudian menyalahkan pemerintah Belanda yang enggan membantunya saat persidangan berlangsung. Namun pengaduan ini secara tidak langsung membocorkan skandal korupsi yang dilakukan oleh Nadjamuddin selama menjabat sebagai perdana menteri NIT (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 133-135).

Nadjamuddin ditangkap pada tanggal 20 September 1947 dan dicopot jabatannya sebagai perdana menteri NIT akibat kasus korupsi. Presiden Soekawati kemudian melantik S. J Warouw sebagai perdana menteri NIT baru pada 11 Oktober 1947 dengan kabinet yang berisi 13 menteri. Pelantikan S. J Warouw memulai masa pemerintahan kabinet Warouw (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 135-136).

Pelantikan kabinet Warouw mendapat kecaman besar dari anggota parlemen, sebab proses pelantikan kabinet tersebut tidak melalui persetujuan seluruh anggota Fraksi dan sikap Warouw yang sangat mendukung Agresi Militer Belanda I terbukti tidak populer di kalangan parlemen (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 136). Selain itu menurut Djunedding (2019, hlm. 571), Kabinet Warouw juga mendukung penindasan para pemuda pejuang Republik Indonesia di Sulawesi Selatan oleh KNIL.

Oleh sebab itu, maka anggota Parlemen dari Fraksi Progresif berusaha menggulingkan kabinet ini. Kabinet ini akhirnya jatuh pada tanggal 9 Desember 1947,

presiden Soekawati lalu berunding dengan seluruh fraksi parlemen. Dari hasil persidangan tersebut, presiden dan para parlemen setuju dengan pelantikan Ide Anak Agung Gde Agung sebagai perdana menteri NIT baru dan menurunkan jabatan S. J Warouw menjadi menteri kesehatan di kabinet Anak Agung (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 136-137).

Pelantikan Ide Anak Agung Gde Agung pada masa ini ditunjang 16 menteri dengan 6 menteri berhaluan *Republikein*. Pada masa pemerintahannya, Anak Agung berusaha memperbaiki hubungan NIT dengan Republik Indonesia yang sempat renggang akibat perlakuan kedua perdana menteri sebelumnya. Beberapa upaya yang dilakukan olehnya ialah memperbaiki hubungan dengan partai-partai *Republikein* yang sebelumnya bersikap non-kooperatif terhadap NIT, dan berusaha melakukan kontak kembali dengan Republik Indonesia dengan mengecam Agresi Militer Belanda I pada 23 Desember 1947 serta mendukung Indonesia pada perjanjian Renville dengan pidato tanggal 1 Januari 1948 (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 137-139).

Cita-cita Anak Agung menurut Chaniago (2002, hlm. 236) ialah melakukan hubungan yang setara antara NIT dengan Republik Indonesia serta menghentikan penggunaan cara revolusi fisik yang dilakukan oleh pejuang Republik Indonesia. Ia menyarankan agar Republik Indonesia melakukan perjuangan dengan cara damai melawan Belanda.

Kerja keras diplomasi Anak Agung akhirnya terwujud ketika pemerintah Republik Indonesia menjalin kembali hubungan dengan NIT dan mengakui Negara Indonesia Timur sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS) pada tanggal 22 Januari 1948. Sebagai rasa terimakasih terhadap pemerintah Republik Indonesia, Anak Agung kemudian mengirim Arnold Mononutu sebagai perwakilan NIT ke Yogyakarta dalam misi persaudaraan pada bulan Februari 1948 (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 139-140).

Gambar 3. Arnold Mononutu (berseragam putih paling kanan) dan rekan-rekannya dalam kunjungan misi persaudaraan RI-NIT di Yogyakarta pada bulan Februari 1948 (Sumber: Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 153).

Sikap Parlemen NIT pada masa pemerintahan Anak Agung semakin berubah terhadap apa yang terjadi pada Republik Indonesia, pada masa ini pemerintah NIT menaruh simpati terhadap keadaan yang terjadi pada Republik Indonesia. Ini terbukti dengan sikap parlemen NIT yang mengecam peristiwa Pemberontakan PKI Madiun pada September 1948, mengecam Agresi Militer Belanda II pada akhir tahun 1948, dan mengakui Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin sah Republik Indonesia pada 28 Januari 1949 (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 140-141).

Selain itu, Anak Agung juga memprakarsai pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia, negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom, serta pemerintah Belanda. Pertemuan ini menghasilkan lembaga bernama BFO (*Bijeenkomst voor Federale Overleg*) atau Permusyawaratan Negara-negara Federal. Pada masa ini BFO berperan sebagai penggagas negara federal di Indonesia. BFO kemudian melangsungkan perundingan-perundingan seperti Konferensi Antar Indonesia (KAI) pada bulan Juli hingga Agustus 1949. Konferensi tersebut menghadirkan wakil-wakil dari Republik Indonesia dan negara-negara bagian serta daerah otonom di Indonesia untuk melakukan persiapan dalam Konferensi Meja Bundar (Wirawan, 2008, hlm. 56).

Pada bulan Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) akhirnya diadakan di Den Haag dan setelah melakukan negosiasi dengan pemerintah Belanda, maka pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengembalikan sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Papua. Meskipun demikian, Indonesia diwajibkan membayar utang 4.3 milyar Gulden kepada Belanda sebagai ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat Revolusi Nasional Indonesia. Pada saat tersebut juga Soekarno diangkat menjadi Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus wakil Presiden RIS. Negara-negara bagian dan daerah otonom buatan Belanda lalu tergabung kedalam Republik Indonesia Serikat (RIS) (Ricklefs, 2005, hlm. 466-467).

Pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT)

Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling dan 800 serdadunya melakukan perebutan tempat-tempat penting di Bandung dan berusaha menyusup Jakarta untuk membunuh beberapa menteri RIS. Namun usaha tersebut gagal dan para serdadu dapat dikalahkan, Westerling kemudian melarikan diri dari Indonesia pada bulan Februari 1950 dengan cara menyamar. Sejak terjadinya peristiwa tersebut, para pemimpin negara Pasundan dicurigai bersekongkol dengan Westerling. Oleh sebab itu, maka para petinggi Negara Pasundan memilih membubarkan negaranya dan melakukan integrasi kembali kedalam Republik Indonesia. Pola-pola ini kemudian ditiru oleh negara-negara federal lainnya di Indonesia (Ricklefs, 2005, hlm. 467).

Pada tanggal 5-7 Februari 1950, 2000 orang berkumpul untuk menghadiri Konferensi Polongbangkeng. Konferensi ini bertujuan untuk menyatukan visi rakyat NIT agar sesuai dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, pada

pemilihan parlemen NIT pada tanggal 20 Februari 1950, parlemen NIT mayoritas diisi oleh kader-kader fraksi yang Pro Republik (Djunedding, 2019, hlm. 571).

Gambar 4. Demonstran memenuhi jalan di Makassar pada 16 Maret 1950 (Sumber: Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm.165)

Pada tanggal 16 Maret 1950, 200.000 rakyat kota Makassar melakukan demonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan ketua parlemen Limboro dan menuntut mosi pada pemerintahan pusat RIS untuk membubarkan NIT dalam waktu secepatnya (Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 162). Bertepatan dengan waktu yang sama, menteri pertahanan RIS, Sultan Hamengkubuwono IX, memerintahkan agar satu batalyon APRIS dapat ditempatkan di setiap wilayah RIS. Demonstrasi di Makassar menjadi alasan bagi APRIS untuk mengamankan kota tersebut, Batalyon Worang kemudian dikerahkan untuk mengamankan kota Makassar .

Kedatangan APRIS tidak selalu diterima baik oleh petinggi NIT. Beberapa diantaranya yang membenci kedatangan APRIS ialah Chris Soumokil dan Andi Azis. Chris Soumokil sangat membenci kedatangan APRIS, menurutnya NIT harus dipertahankan dengan sekuat-kuatnya. Ia kemudian bersekongkol dengan Andi Azis, mantan KNIL, untuk menghentikan batalyon Worang tiba di Makassar pada tanggal 5 April 1950 (Bahtiar, Ansaar, dan Sritimuryati, 2019, hlm. 3)

Andi Azis kemudian melancarkan pemberontakan bersama 1300 mantan anggota KNIL dan menduduki kota Makassar pada tanggal 5 April 1950. Melihat pergerakan militer yang dilakukan tanpa seizinnya, Presiden Soekawati kemudian menyampaikan pesan melalui telegram kepada pemerintah pusat RIS bahwa ia telah menolak permintaan Andi Azis untuk memimpin pasukan sebanyak empat kali dan tak bertanggungjawab atas peristiwa pemberontakan (Bahtiar, Ansaar, dan Sritimuryati, 2019, hlm. 11). Perlawanan Andi Azis berakhir setelah ia menyerahkan diri ke Jakarta dan dipenjara pada 13 April 1950. Chris Soumokil dan beberapa petinggi NIT yang bersekongkol dengan Andi Azis kemudian melarikan diri ke Ambon menggunakan pesawat perang Belanda (Bahtiar, Ansaar, dan Sritimuryati, 2019, hlm. 15-16).

Pada tanggal 21 April 1950, Presiden Soekawati menyampaikan pesannya agar NIT dibubarkan dan bergabung kembali kedalam Republik Indonesia. Pernyataan ini mendapatkan dukungan dari seluruh daerah di NIT kecuali Maluku Selatan. Chris Soumokil bersama mantan KNIL di Maluku Selatan lalu melancarkan pemberontakan dengan mendirikan Republik Maluku Selatan pada akhir April 1950 (Kahin, 1952, hlm. 460).

Gambar 5. Ir. Putuhena (celana coklat di tengah foto) dan anggota kabinet Likwidasi lainnya pada Mei 1950 (Sumber: Departemen Penerangan Indonesia, 1953, hlm. 172).

Pada 3-5 Mei 1950, Presiden Soekawati kemudian melakukan pertemuan dengan Moh. Hatta dan dr. Mansur, presiden Negara Sumatra Timur, untuk merencanakan proses integrasi NIT dan Negara Sumatra Timur kedalam Republik Indonesia (Kahin, 1952, hlm. 460-461). Hasil keberhasilan pertemuan tersebut, presiden Soekawati kemudian menunjuk Ir. Putuhena sebagai perdana menteri baru NIT. Kabinet Putuhena dikenal pula dengan nama Kabinet “Likwidasi” dan bertugas untuk persiapan pembubaran NIT (Djunedding, 2019, hlm. 572).

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia kelima. Presiden Soekarno membubarkan RIS dan mengembalikan pemerintahan menjadi Republik Indonesia. Negara-negara bagian dan daerah otonom seperti NIT akhirnya dibubarkan pada tanggal yang sama dan bekas wilayahnya terintegrasi kembali kedalam Republik Indonesia (Ricklefs, 2005, hlm. 468).

Simpulan

Sejak kedatangan Letnan Gubernur Jenderal H. J. van Mook ke Indonesia, ia telah memukan cara yang tepat untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia yakni dengan mendirikan negara federal di Indonesia. Walaupun idenya sempat ditolak oleh sebagian besar rakyat Indonesia, ia berhasil mengajak rakyat Indonesia timur untuk mendirikan negara federal buatan Belanda baik secara alami maupun melalui paksaan. Negara Indonesia Timur (NIT) akhirnya terbentuk setelah melalui dua perundingan yakni Perundingan Malino (15 Juli 1946) dan Konferensi

Denpasar (24 Desember 1946). Kepemimpinan NIT dijabat oleh presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen. Perdana menteri mengetuai para menteri dalam sebuah kabinet. Sedangkan ketua parlemen memimpin parlemen yang terdiri dari berbagai fraksi partai. Presiden NIT memiliki kewenangan untuk mengganti kabinet dan parlemen.

Adapun untuk sistem pemerintahan daerah diberikan kepada raja atau kepala daerah dengan daerah yang dikenal sebagai *swapraja*. Para pemimpin daerah mendapatkan otonomi dengan syarat mematuhi peraturan *korte verklaring* (deklarasi jangka pendek) dan *lange kontrakten* (kontrak jangka panjang) bentukan Belanda. Pola pemerintahan daerah di NIT ada dua yakni pola Bali dan pola Lombok.

Pada masa awal terbentuknya NIT, kondisi Indonesia timur dalam keadaan yang kacau dan terjadi beberapa peristiwa yang merenggangkan hubungan antara NIT dengan RI. Diantaranya ialah pembantaian massal oleh Westerling terhadap pejuang Indonesia, kekacauan pada sidang pertama NIT, kontroversi pemerintahan perdana menteri Nadjamuddin dan Warouw yang mendukung Agresi Militer Belanda I. Hubungan antara RI dan NIT kembali membaik pada masa pemerintahan setelah pelantikan perdana menteri Ide Anak Agung Gde Agung. Pada masa pemerintahannya, Anak Agung mendekatkan NIT dengan RI dan membantu RI dalam mendapatkan kedaulatannya atas Belanda. Anak Agung juga mencetuskan didirikannya BFO pada tahun 1948 yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara federal. Pada masa Anak Agung juga para *Republikiens* atau pro Republik semakin berkembang dalam parlemen NIT.

RIS akhirnya berdiri pada 27 Desember 1949 dan NIT kemudian bergabung menjadi negara bagian RIS. Namun negara-negara buatan belanda terbukti tidak populer dan kebanyakan rakyatnya meminta pemerintah pusat RIS untuk mengintegrasikan kembali negara-negara bagian tersebut kedalam Republik Indonesia. Namun proses pembubaran NIT tidak selalu diterima baik. Dua tokoh penting NIT yakni Andi Azis dan Chris Soumokil menentang keras dibubarkannya NIT. Mereka melakukan pemberontakan untuk menghindari NIT bergabung kembali kedalam Republik Indonesia. Namun, keduanya gagal untuk membendung semangat persatuan Indonesia.

Proses pembubaran NIT baru dimulai pada 21 April 1950 dengan pesan Presiden Sukawati yang menginginkan NIT dibubarkan. Presiden Sukawati kemudian melantik kabinet terakhir NIT yakni kabinet Putuhana pada Mei 1950 yang bertujuan sebagai persiapan pembubaran NIT. Pada tanggal 17 Agustus 1950, tepat pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia kelima. Presiden Soekarno membubarkan RIS dan mengembalikan pemerintahan menjadi Republik Indonesia. Negara-negara bagian dan daerah otonom seperti NIT akhirnya secara resmi dibubarkan pada tanggal yang sama dan bekas wilayahnya terintegrasi kembali kedalam Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agung, A.A.G. (1992). "Negara Kesatuan: Negara Indonesia Timur". Dalam BKSNT Ujung Pandang (Penyunting), *Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur*. Malino: BKSNT UJUNG PANDANG.
- Agung, I. A. A. G. (1996). *From the Formation of the State of East Indonesia towards the Establishment of the United States of Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Amir, M. (2010). *Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950*. *Patanjala*, 2(2), 341-358.
- Bahtiar, B, Ansaar, & Sritimuryati. (2019). "PERISTIWA ANDI AZIS DI SULAWESI SELATAN 5 APRIL 1950 (ANDI AZIS EVENTS IN SOUTH SULAWESI 5 APRIL 1950)". Dalam Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan (Penyunting), *Seminar Series in Humanities and Social Sciences*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Bayly, C., & Harper, T. (2008). *Forgotten Wars: The End of Britain's Asian Empire*. Westminster: Penguin Books.
- Chaniago, J. R. (2002). Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950. (Disertasi Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Departemen Penerangan Indonesia. (1953). *Provinsi Sulawesi*. Makassar: Kementrian Penerangan.
- Djunedding, B. (2019). PERJUANGAN TANPA REVOLUSI: PERSPEKTIF BARU DALAM MEMAHAMI KEKERASAN PERIODE REVOLUSI DI INDONESIA TIMUR 1945-1950. *Al-Qalam*, 25(3), 561-574.
- Gie, T. L. (1967). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Harvey, B. (1990). Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot. Dalam Kahin, A. R. (Penyunting), *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (hlm. 212 -240). Jakarta: Grafiti.
- Kadir, H. (1984). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: BAPPEDA Tingkat UNHAS.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

- Makkelo, I. D. (2017). PENATAAN KOTA DAN MASYARAKAT PERKOTAAN: MAKASSAR SEBAGAI IBUKOTA NEGARA INDONESIA TIMUR (NIT) 1946-1950. *SASDAYA: Gajah Mada Journal of Humanities*, 2(1), 315-333.
- Male, B. (1965). Australia and the Indonesian Nationalist Movement 1942-1945. (*Thesis Tidak Diterbitkan*). Canberra: Australian National University.
- Najamuddin, N., & Bustan, B. (2017). "Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) Di Sulawesi Selatan 1946-1950". Dalam Najamuddin (Penyunting), *Seminar Nasional LP2M UNM* (hlm. 390-395). Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Simanjuntak, B. A. & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Susanti, A. F. (2013). NEGARA INDONESIA TIMUR TAHUN 1946-1950. *Avatara*, 1(3), 592-596.
- Wirawan, A. B. (2008). Respons Lokal Terhadap Revolusi Indonesia Di Sunda Kecil, 1945-1950. *Humaniora*, 20(1), 51-62.
- Yusuf, Z. R, Melay, R., & Bunari. (2017). Pembantaian Raymond Pierre Paul Westerling Di Sulawesi Selatan Sebagai Upaya Belanda Mendirikan Negara Indonesia Timur (1946-1947). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 4(1), 1-10.